

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi di mana semua pihak harus bergerak cepat dalam segala hal agar tidak tertinggal, menjadikan informasi sebagai unsur penting yang dikedepankan dan menjadi kunci keberhasilan dalam perkembangan segala hal baik di bidang pendidikan, bisnis, sosial, politik, keamanan maupun lainnya.

Salah satu masalah besar yang dihadapi di era tersebut adalah begitu banyak orang yang tertinggal dari partisipasi yang berarti dalam aspek-aspek tersebut yaitu adanya sekelompok orang yang terpinggirkan. Kelompok masyarakat itu merentang sangat luas seperti kelompok masyarakat miskin, isolasi budaya dan bahasa, agama dan termasuk para penyandang cacat atau sering disebut anak berkebutuhan khusus.

Landasannya sangat jelas dan kuat. Bukan semata dalam rangka mewujudkan komitmen global seperti yang antara lain tercantum dalam kesepakatan Dakar 2000 tentang “Education For All” (EFA) serta tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals – MDGs) atau bentuk-bentuk komitmen global yang lainnya, melainkan adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit mengikat negara atau pemerintah untuk melaksanakannya.

Lebih jelasnya, pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan setiap warga negara wajib menikmati pendidikan dasar, dan karenanya pemerintah punya kewajiban untuk memenuhinya. Bahkan secara operasional, hal itu juga telah dipertegas melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (USPN).

Pasal 5 ayat 1 dalam undang-undang dimaksud dengan tegas mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan dalam ayat berikutnya, ayat 2, diungkapkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak

memperoleh pendidikan khusus.

Khusus mengenai Wajar Dikdas 9 tahun, simak pula Pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dalam ayat berikutnya, ayat 2, diungkapkan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan semua itu, tidak sedikit kebijakan, termasuk upaya dan langkah telah dilakukan oleh pemerintah. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 tahun 1971 tentang pembangunan sekolah dasar yang diikuti dengan Inpres-inpres lainnya cukup menjadi isyarat bahwa sejak lama pemerintah punya tekad untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk oleh masyarakat dari kalangan tidak mampu, baik dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal.

Wujud konkritnya, bangunan sekolah-sekolah baru yang kemudian dikenal dengan sebutan SD Inpres didirikan untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dasar, disamping fasilitas dan tenaga kependidikannya, termasuk guru-gurunya. Menurut sumber Depdiknas, saat ini terdapat tidak kurang dari 865.258 buah bangunan Sekolah Dasar (SD), termasuk swasta dan sebagian besarnya merupakan SD Inpres yang didirikan antara tahun 1970-an sampai dengan pertengahan tahun 1980-an. Sementara itu, jumlah SMP tercatat sebanyak 167.480 buah yang sebagian besarnya dibangun antara tahun 1980-1990-an sebagai antisipasi pelaksanaan Wajar Dikdas yang waktu itu ditergetkan bisa terwujud pada tahun 2003.

Bukan hanya itu, berbagai program layanan pendidikan, baik yang dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal terus dikembangkan, disamping dilakukan pula melalui penyelenggaraan berbagai bentuk bantuan yang diharapkan bisa membantu meringankan beban pendidikan bagi masyarakat.

Lahirnya kebijakan UNESCO lantas mencetuskan kebijakan pendidikan inklusif. Kebijakan ini menjadi penting karena sudah sejak lama anak berkebutuhan khusus juga memiliki keinginan yang besar untuk belajar di sekolah reguler dan juga bersolisasi dengan anak-anak normal (Kompas, 2005). Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusif ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003

tentang pendidikan inklusif yang menyatakan bahwa penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya empat sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Hal ini dikukuhkan lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri No.22 Tahun 2006 yang berbunyi: „Peserta didik pendidikan inklusif adalah peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Berkelainan dalam hal ini adalah tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras”.

Upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat tersebut, tidak hanya bagi anak normal dengan anak cacat (berkebutuhan khusus) akan tetapi juga bagi kalangan mampu dan kaum dhuafa, serta perbedaan lainnya. Mereka (anak berkebutuhan khusus) seyogianya dapat bersekolah dan mendapatkan ijazah layaknya anak normal.

Diperkirakan ada sekitar 113 juta anak usia sekolah tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah (*International Consultative Forum on Education For All, 2000*). 90% dari sejumlah itu hidup di negara-negara miskin di Afrika dan Asia. Mereka ini tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah dan juga sebagian besar dari mereka keluar dari sekolah (*drop out*) sebelum dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Semua pihak mengakui bahwa strategi dan program yang saat ini dilaksanakan tidak mencukupi atau bahkan tidak cocok untuk melayani anak-anak dan remaja yang rawan dan rapuh termasuk anak-anak penyandang cacat yang termarginalisasikan atau terpinggirkan untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhannya.

Di Indonesia hingga saat ini jumlah anak berkebutuhan khusus terus meningkat dari 1 : 10.000 pada tahun 2005, kini 1 : 15.000. Pada saat ini jumlah mereka un terus bertambah seiring dengan berbagai penyebab baik semasa dalam kandungan ataupun masa keemasan dalam perkembangan.

Saat ini, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia mengalami kemerosotan. Data Balitbang Kemendikbud dari tahun 2005 hingga tahun 2007 menunjukkan bahwa selisih antara jumlah sekolah inklusif dan jumlah siswa semakin besar. Pada tahun 2005 jumlah siswa 6000 orang dan jumlah sekolah inskulisif 504 sekolah. Pada tahun 2006 jumlah siswa 9.492 dan jumlah sekolah insklusif sebanyak 600 sekolah. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah siswa mencapai 15.181 orang tetapi jumlah sekolah inklusif hanya mencapai 796 sekolah. Sementara itu, jumlah penyandang cacat usia sekolah di Indonesia 1,5 juta, maka jumlah anak yang berkelainan yang terlayani oleh sekolah insklusif baru mencapai 1%. Jumlah SD insklusif hanya mencapai 0,44% (Sunaryo, 2009:8). Hingga pada tahun 2008, jumlah sekolah insklusif secara nasional dari SD hingga SMA hanya 254 sekolah. Pada tahun 2010 angka partisipasi murni anak berkebutuhan khusus untuk jenjang pendidikan dasar baru mencapai 30%. Dengan demikian, jumlah anak berkebutuhan khusus yang belum merasakan jaminan pendidikan masih cukup banyak, yaitu 70%.

Dan selanjutnya menurut Mudjito dkk (2012: 12) yang dikutip dari data Kementerian Sosial RI tahun 2008, total jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) sebanyak 1.544.184 anak. Kemudian diprediksi pada tahun 2010 angka anak berkebutuhan khusus dari umur 5-18 tahun adalah 21,42% dari jumlah ABK dengan berbagai kekurangan/kecacatan yakni 330.764 anak. Anak berkebutuhan khusus yang sudah mendapatkan layanan pendidikan di sekolah khusus (SLB dan atau inklusi) dari jenjang Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Pertama hanya 85.737 anak (sekitar 25,92%). Berarti masih ada 245.027 anak (74,08%) berkebutuhan khusus yang belum mendapat layanan pendidikan dengan berbagai jenis kelainan, dan sebagian besar mereka tinggal di perdesaan dan pusat-pusat perkotaan.

Dika (2010) mengungkapkan hambatan-hambatan yang tengah dihadapi dalam pendidikan inklusif sebagai berikut: (a) kurikulum yang tersusun kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda dan negara mendorong kebutuhan pendidikan dasar tanpa memperhatikan issue pendidikan anak

berkebutuhan khusus, (b) kebijakan yang kurang mendukung dengan tidak memisahkan komponen pendidikan khusus ini yang seharusnya tidak lagi dibedakan, dalam arti bahwa pendidikan inklusi bukan lagi tambahan tetapi masuk dalam pengaturan umum, (c) kurangnya ketersediaan anggaran, (d) dukungan sumber daya manusia yang terbatas, serta (e) pandangan masyarakat terhadap pendidikan yang kurang dipahami secara utuh. Sementara Sunardi (dalam Sunaryo, 2009:10-12) menyatakan bahwa secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bias, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru dan *support sistem*. Lebih jauh dikatakan bahwa pendidikan inklusi dipahami sebagai upaya memasukkan *disabled children* ke sekolah *reguear* dalam rangka *give education right* dan kemudahan *aces education* dan *againts discrimination*. Di samping itu pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah, dan dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan *complain* orang tua dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan. Rudiwati (2011: 17) mengungkapkan bahwa kompetensi guru dalam sekolah inklusif belum memadai. Kompetensi guru yang belum memadai pada sekolah inklusif mencakup kompetensi *pedagogic*, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Untuk menjangkau kebutuhan anak-anak yang terpingirkan, dan terkucilkan dari kelompok masyarakat (termasuk anak-anak penyandang cacat) dapat dilakukan melalui kesempatan pendidikan yang bersifat responsif dan disesuaikan. Hal ini dirumuskan dalam Forum Pendidikan Dunia di Dakar (*Dakar World Education Forum*, April 2000). Rumusan akhir dari forum itu adalah tantangan utama yang dihadapi adalah menjamin visi pendidikan untuk semua yang luas sebagai konsep yang bersifat inklusif yang tercermin dari kebijakan

nasional setiap negara dan pemerintah tentang kebijakan pendidikan. Pendidikan untuk semua harus mengambil tanggung jawab tentang kebutuhan golongan miskin dan tidak beruntung, termasuk, pekerja anak, anak-anak di daerah pedesaan yang terpencil, anak dari budaya-bahasa minoritas, anak/remaja di daerah konflik, remaja yang terinfeksi HIV dan AIDS, dan anak-anak yang memerlukan kebutuhan khusus akan pendidikan (termasuk penyandang cacat).

Pendidikan inklusif sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar dari semua anak, remaja dan orang dewasa yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang rawan dan rapuh, terpinggirkan dan terabaikan. Prinsip pendidikan inklusif di adopsi dari Konferensi Salamanca tentang Pendidikan kebutuhan khusus (UNESCO, 1994) dan di ulang kembali pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar (2000).

Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, anak-anak berbakat (*gifted children*), pekerja anak dan anak jalanan, anak daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salaman Statement, 1994).

Menurut Tarmansyah (2007: 12) pendidikan inklusif hadir dengan sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berupaya menjangkau semua kondisi psikologis dan fisik anak tanpa terkecuali. Dengan hadirnya pendidikan inklusif maka hak-hak anak berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu senantiasa akan terakumulasi dan memberikan hal positif bagi anak berkebutuhan khusus untuk terus berkembang dan tumbuh menjadi dewasa yang mandiri dan cerdas.

Sekarang ini, penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia menjadi gagasan yang telah dipayungi oleh kebijakan pemerintah yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau

bakat istimewa. Peraturan menteri tersebut memuat dengan lengkap rambu-rambu mengenai pendidikan inklusi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Salah satu hal signifikan yang tercatat dalam Peraturan Menteri tersebut adalah mengenai kewajiban pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk menunjuk minimal satu sekolah yang harus menyelenggarakan pendidikan inklusi. Dalam praktiknya, pendidikan inklusi bukan lagi menjadi *trend* yang berkiblat pada kebijakan pemerintah, melainkan secara otomatis berlangsung pada banyak sekolah yang di dalamnya terdapat siswa berkebutuhan khusus.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 pasal 2 tentang pendidikan inklusif bertujuan untuk:

- (a) “memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecardasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan kemampuannya.”
- (b) “mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a”.

Pendidikan inklusif bersifat terbuka terhadap perbedaan karakter peserta didik dan berupaya mengakomodasi setiap perbedaan tersebut dengan cara-cara yang tidak merugikan peserta didik lain. Bahkan, dalam pendidikan inklusi diharapkan perbedaan karakteristik siswa menjadi pembelajaran tersendiri dan bernilai manfaat bagi setiap peserta didik. Usaha saling memahami perbedaan antar peserta didik dan upaya untuk memperlakukan perbedaan antar peserta didik secara semestinya memberi nilai *plus* bagi pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusif adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, maka perlu peningkatan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, baik yang telah memasuki sekolah reguler (SD) tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun yang belum mengenyam pendidikan sama sekali karena tidak diterima di SD terdekat atau karena lokasi SLB jauh dari tempat tinggalnya, karena pada kenyataannya di dalam

masyarakat terdapat anak reguler dan anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

Konsep dasar pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atas akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Pihak sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PLB, 2007: 4).

Berdasarkan hasil penelitian Sunardi (dalam Sunaryo, 2009:10-12) terhadap 12 sekolah penyelenggara inklusif, secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bias, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Salah satu bagian penting dari support system adalah tentang penyiapan anak. Selanjutnya, berdasar isu-isu tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman inklusi dan implikasinya: (a) Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan/penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah reguler dalam rangka give education right dan kemudahan access education, dan againt discrimination, (b) Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah, (c) Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proactive dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan.
2. Kebijakan sekolah: (a) Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk

mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait, (b) Masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus.

3. Proses pembelajaran: (a) Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi, (b) Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan flexible curriculum, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran, (c) Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar, (d) Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, sumber dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak, (e) Belum adanya panduan yang jelas tentang sistem penilaian. Sistem penilaian belum menggunakan pendekatan yang fleksibel dan beragam, (f) Masih terdapat persepsi bahwa sistem penilaian hasil belajar ABK sama dengan anak normal lainnya, sehingga berkembang anggapan bahwa mereka tidak menunjukkan kemajuna belajar yang berarti.
4. Kondisi guru (a) Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang not sensitive and proactive yet to the special needs children. (b) Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK. (c) Belum didukung dengan kejelasan aturan tentang peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing guru. (d) Pelaksanaan tugas belum disertai dengan diskusi rutin, tersedianya model kolaborasi sebagai panduan, serta dukungan anggaran yang memadai.
5. Sistem dukungan (a) Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi - LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas, (b) Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistis terhadap anaknya, (c) Peran SLB yang diharapkan mampu berfungsi sebagai resource centre bagi sekolah-sekolah inklusi di lingkungannya, belum dapat dilaksanakan secara optimal, baik karena belum adanya koordinasi dan kerja sama maupun alasan geografik. Peran ahli yang diharapkan dapat berfungsi sebagai media konsultasi, advokasi, dan pengembangan SDM sekolah masih sangat minimal. LPTK PLB dalam diseminasi hasil penelitian, penelitian kolaborasi maupun dalam implementasi terhadap hasil-hasil penelitian belum dapat diwujudkan dengan baik. Peran pemerintah yang

seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi inklusi secara baik dan benar melalui regulasi aturan maupun.

Banyak harapan dari implementasi pendidikan inklusif, namun fakta menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif (Hasil diskusi dengan guru dan kepala sekolah penyelenggara inklusif peserta pelatihan di Yogyakarta, 2009). Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi antara lain: (1) masih ada kesulitan menyelaraskan antara standar layanan persekolahan reguler yang selama ini berjalan dan variasi kebutuhan belajar ABK; (2) sekolah inklusif belum menerima siswa ABK; (3) sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat, bagi ABK dengan kondisi kecerdasan di bawah rata-rata (tunagrahita); (4) belum ada sistem evaluasi hasil belajar (baik formatif dan sumatif) yang tepat sesuai kebutuhan ABK; (5) kurangnya sarana dan sumber belajar asesabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan belajar ABK; (6) belum semua guru reguler memiliki kompetensi memberikan layanan ABK dan masih minimnya guru khusus di sekolah inklusif, meskipun bukan suatu keharusan (indentik) antara guru khusus dan sekolah inklusif; (7) belum seluruh warga sekolah memiliki kesepahaman tentang pendidikan inklusif dan layanan ABK; (8) masih adanya anggapan keberadaan ABK akan mempengaruhi ketuntasan hasil belajar akhir tahun, akibatnya ABK dipindahkan di SLB menjelang ujian; (9) layanan inklusif masih belum menyatu dalam sistem dan iklim sekolah, sehingga ada dua label siswa ABK dan reguler; (10) belum semua pengambil kebijakan termasuk bidang pendidikan memahami tentang sistem inklusif; (11) secara pengelolaan pelaksanaan pendidikan inklusif kurang dipersiapkan dengan komprehensif; dan (12) belum optimalnya penyediaan bahan ajar sesuai kebutuhan ABK.

Berdasarkan hasil penelitian Sunardi (2009) terhadap 12 sekolah penyelenggara inklusi di Kabupaten dan Kota Bandung, secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bisa, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu

sendiri, yaitu : pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Salah satu bagian penting dari support system adalah tentang penyiapan anak. Selanjutnya, berdasar isu-isu tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman inklusi dan implikasinya

- a. Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan/penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah regular dalam rangka *give education right and kemudahan access education, and againt discrimination*.
- b. Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah.
- c. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap *proactive* dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan

2. Kebijakan sekolah

- a. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait.
- b. Masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus.

3. Proses pembelajaran

- a. Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi.

- b. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan *flexible curriculum*, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran.
- c. Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar.
- d. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.

4. Kondisi guru

- a. Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang *not sensitive and proactive yet to the special needs children*.
- b. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK.

5. Sistem dukungan

- a. Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi – LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas.
- b. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistis terhadap anaknya.

Syukron Zahidi A, (2014) mengemukakan bahwa kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif pada sekolah yang secara alami mengembangkan pendidikan inklusif (penulis observasi di SD Negeri Pecarikan Prembun Kebumen), beberapa kecenderungan yang terjadi di lapangan, diantaranya:

1. Secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusif, bahkan sampai sekarang belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi
2. Para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah.
3. Adanya protes terhadap kenaikan ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas.
4. Tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru (kreatif) melalui kebersamaan, saling diskusi, saling berbagai.
5. Perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus menerus melalui kerja sama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman.
6. Mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua.
7. Sekalipun diakui menambah beban tambahan, namun diterima sebagai tantangan (<http://www.kompasiana.com>)

Dan lebih jelas para ahli pendidikan mengemukakan pendapat beragam tentang pendidikan inklusif. Namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Smith, J. David (2006: 45) berpendapat kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. Inklusi juga dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan adalah, keterlibatan dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep dari (visi misi) sekolah. Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan (Direktorat PLB, 2007: 6).

Stainback (Tarmansyah, 2007: 82) mengemukakan bahwa: pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Selanjutnya menurut Staub dan Peck (Tarmansyah, 2007: 83) menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Sementara itu, Sapon-Shevin dan O'Neil (Tarmansyah, 2007: 83) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya perombakan sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua peserta didik baik yang normal maupun berkelainan di lingkungan sekolah dan kelas yang sama. Sekolah inklusi menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif yaitu sekolah yang mengadopsi pendidikan untuk semua (*education for all*) yaitu semua anak bisa belajar di lingkungan yang sama baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus (ABK) tanpa memandang kelainan fisik maupun mental, tanpa adanya diskriminatif dari lingkungan belajar dan saling menghargai keanekaragaman yang bertujuan untuk mewujudkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang bermutu untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, yaitu tenaga pendidik, sarana

dan prasarana, kurikulum, dan sistem evaluasinya pun harus dikemas sesuai dengan kebutuhan siswa baik yang normal maupun anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada pendidikan inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi (Direktorat PLB, 2007: 4-6).

Namun dalam pelaksanaannya program penyelenggaraan pendidikan inklusif masih terdapat beberapa masalah di antaranya yaitu kurangnya tenaga pendidik, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, kurang efektif dalam pelaksanaan sekolah inklusi, kurangnya sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran, kurangnya perencanaan manajemen dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, evaluasi dan monitoring yang kurang dilakukan oleh pihak dinas terkait, masih rendahnya prestasi belajar siswa, serta metode pembelajaran yang belum sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Sementara itu juga terdapat masalah-masalah lainnya seperti alasan ekonomi, sosial, dan politik yang memiliki keterbatasan. Indikator-indikatornya yang terimplementasi adalah belum berkembangnya pendidikan inklusif di sekolah dasar, di antaranya: belum terlihatnya nilai-nilai budaya inklusif, baik

dalam kebijakan maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, misalnya dalam merespons dalam keberagaman siswa; anak yang mengalami hambatan masih rentang termajinalisasikan (tekanan eksklusif), misalnya anak penyandang disabilitas kadang ditolak, anak yang mengalami masalah belajar kurang diikutsertakan dalam kegiatan sekolah; mutu atau kualitas proses dan hasil belajar belum ada peningkatan secara berarti; aksesibilitas fisik sekolah belum diperhatikan, kurikulum belum dapat diakses oleh setiap anak, sehingga masih terjadinya tinggal kelas, bahkan putus sekolah (*drop out*); lingkungan sosial sekolah belum begitu ramah terhadap siswa yang mengalami hambatan dalam belajar dan perilaku; hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan di dalam lingkungan masyarakat masih terabaikan, misalnya anak yang berada di lingkungan sekolah X justru diterima di sekolah Z yang jauh dari lingkungannya; para guru dan kepala sekolah cenderung memandang keragaman siswa terutama yang ekstrim merupakan sumber masalah, bukannya memandang kekayaan sumber; belum terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara sekolah dengan masyarakat, bahkan lingkungan sekolah milik sekolah.

Dengan kata lain, bahwa pendidikan inklusif yang sudah begitu lama diimplementasikan di sekolah belum optimal karena nilai-nilai, keyakinan, prinsip pendidikan inklusif belum menjadi kerangka dan kriteria keberhasilan. Dalam implementasi pendidikan inklusif belum memperhatikan konteks dan budaya lokal, belum mempertimbangkan situasi praktis, belum memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan faktor-faktor budaya setempat. Belum optimalnya dan refleksi diri yang kritis kurang diperhatikan, dan belum optimalnya pelibatan berbagai sumber.

Pendidikan inklusi memang tengah bergerak progresif, namun masih banyak ditemukan kendala untuk melaksanakannya. Dari fasilitas yang terbatas, misalnya fasilitas rogram khusus, seperti ruang terapi, mauun sumber daya manusia yang kapabel. Sekolah inklusi adalah sebuah metamorfosa budaya manusia yang semakin moderen dan mengglobal. Bahwa setia manusia adalah sama, punya hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan

pendidikan demi mengejar kehidupannya yang lebih baik. Sekolah inklusi merupakan sebuah jawaban, bahwa pendidikan tak mengenal diskriminasi, semua berhak untuk mendapatkannya, namun perlakuan edukasi selama ini belum memperoleh alternatif pilihan yang kondusif. Saat ini sekolah inklusi masih identik dengan mencampur anak berkebutuhan khusus dengan anak biasa. Padahal sekolah bisa disebut inklusi, jika dapat melihat anak secara individual dengan pendekatan individual, bukan klasikal. Artinya, saat ini pendidikan masih melihat peserta didik dengan satu kaca mata, semua anak adalah sama, padahal setiap anak terlahir dengan fitrahnya masing-masing. Setiap anak harus diberi ruang dan hak untuk berkembang sesuai dengan kapasitas dan bakat yang dibawanya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, kepala sekolah, guru, serta pengawas sekolah, mengindikasikan bahwa sekolah dasar yang mengimplementasikan pendidikan inklusif, banyak mengalami hambatan, rintangan dan tantangan yang datangnya dari dalam (faktor internal) maupun dari luar sekolah (eksternal). Kondisi tersebut merupakan hambatan untuk mensukseskan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk bersekolah. Asumsi yang muncul dalam hal tersebut atas kondisi masyarakat Jawa Barat dengan sumber daya yang meningkat akan memberikan dampak terhadap perluasan akses pendidikan inklusif yang bermutu.

Hal ini menjadi hal menarik untuk diteliti, sebagai upaya dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memberi dampak terhadap kinerja implementasi pendidikan inklusif, untuk kemudian mencari solusi dan strategi pemecahan masalahnya guna mengoptimalkan upaya pemberdayaan pendidikan inklusif. Data awal menunjukkan bahwa implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Barat masih memerlukan usaha-usaha untuk optimalisasi program dan belum secara maksimal mengakomodasi faktor-faktor dominan yang menentukan tingkat keberhasilan pencapaiannya, baik faktor strategik sistem pendidikan dan faktor-faktor kritis implementasi kebijakan, maupun potensi lingkungan eksternal terkait faktor ekonomi dan sosial budaya

masyarakat yang dipresentasikan melalui perilaku tingkat partisipasi anak sekolah.

Sebagaimana diketahui pula kebijakan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan pendekatan filosofis inklusi dilatarbelakangi oleh konsep sekolah yang ramah bagi perbedaan yang menjadi realisasi dari penerapan filosofis pendidikan inklusi. Sehingga diyakini bahwa melalui perubahan yang mendasar dalam bentuk sekolah sehingga menjadi sekolah yang ramah maka akan dapat mengakomodir seluruh anak dapat mengikuti pendidikan.

Untuk mencapai terbentuknya sekolah yang ramah, maka diperlukan strategi yang matang. Hal ini disebabkan perlu dilakukan reorientasi bentuk sekolah secara mendasar. Perubahan yang mendasar pada sekolah juga akan berdampak kepada perubahan langsung kepada guru, kepala sekolah dan staf sekolah. Dengan demikian akan terjadi perubahan yang secara menyeluruh ketika filosofi pendidikan inklusi dijadikan sebuah pendekatan dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sebagai strategi untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua (*education for all*). Pendidikan inklusif bertujuan untuk membangun konsep yang koheren dan kerangka kebijakan yang kontekstual dengan kondisi lingkungan sehingga tersedia akses dan kesamaan dalam pendidikan dasar untuk semua anak, dan apa yang tergantung dalam pendidikan sehingga kebutuhan pendidikan yang beragam dapat direspon dan dipenuhi di dalam jalur utama pendidikan (pendidikan biasa), baik pada jalur formal maupun pendidikan non-formal.

B. Fokus Penelitian

Berbagai upaya mewujudkan sekolah yang memprioritaskan input, proses, output dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SDN Kota Cimahi, terus dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders dan pelaksana pendidikan.

Pertama, dalam konteks administrasi dan manajemen pendidikan yang berorientasi kepada kegiatan lapangan dari studi, praktek dan empiric yang berkaitan dengan lembaga pendidikan. *Kedua*, kualitas pendidikan menuntut suatu

manajemen mutu, kepemimpinan lembaga pendidikan, budaya sekolah dan kinerja sekolah dengan mengacu kepada kemampuan pengelolaan secara mandiri. *Ketiga*, penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. *Keempat*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. *Kelima*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif selama ini sangat minim. *Keenam*, mutu pendidikan sering diartikan sebagai karakteristik jasa pendidikan yang sesuai dengan kriteria tertentu untuk memenuhi kepuasan pengguna (*user*) pendidikan, yakni peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak berkepentingan. *Ketujuh*, masalah sosialisasi pendidikan inklusif dengan pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. *Kedelapan*, program pendidikan inklusif yang dijalankan di sekolah-sekolah yang mempunyai murid-murid berkeperluan khas. Peluang pendidikan untuk murid-murid berkeperluan khas belajar di dalam kelas biasabersama-sama murid-murid normal di aliran perdana dengan mengikuti kurikulum biasa, mendapat bimbingan sama rata oleh guru mata pelajaran dengan dibantu oleh guru pendidikan khas (guru pembimbing). *Kesembilan*, pengorganisasian dengan pendekatan manajemen kelas inklusi adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian yang menampung segala perbedaan untuk menunjang pembelajaran yang kondusif sesuai dengan yang telah direncanakan. *Kesepuluh*, pelaksanaan program dengan pendekatan prinsip Management berbasis sekolah yang dilaksanakan secara

bertahap dan berkesinambungan pada pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan di SPPI SD dilaksanakan dengan prinsip inklusi (menghargai perbedaan). *Kesebelas*, monitoring dan evaluasi menggunakan pendekatan dalam penyelenggaraan, peserta didik, ketenagaan, sarana-prasarana, pendanaan, manajemen, pemberdayaan masyarakat, dan aspek lain yang relevan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur dan menilai hasil serta kinerja pelaksanaan program penyelenggara sistem pendidikan inklusif di SPPI SD. *Keduabelas*, dampak program pendidikan inklusif bagi upaya pemenuhan hak akses pendidikan inklusif dengan pendekatan pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan di SPPI. Terwujudnya proses pembelajaran dengan lingkungan pembelajaran yang kondusif, komunikatif, aksesibel ramah dan bersahabat untuk semua.

Cara pandang kedua adalah apa yang disebut '*Education system as problem*'. Pandangan ini menganggap bahwa persoalan keberhasilan pendidikan tidak tergantung pada faktor 'anak', akan tetapi faktor sistem pendidikan yang digunakan. Jika pendidikan untuk semua belum berhasil mencapai hasil yang optimal, maka sistemnya yang harus diperbaiki. Implikasinya adalah harus ada perubahan cara pandang guru, modifikasi kurikulum dan pembelajaran, modifikasi sistem penilaian, penyediaan lingkungan yang aksesibel, pelibatan orangtua, pelatihan bagi kepala sekolah dan guru yang berkelanjutan.

Implikasi dari pergeseran paradigma pendidikan ABK, maka sistem pendidikan ABK bergeser dari sistem segregatif ke sistem integratif dan inklusif. Sistem segregasi adalah sebuah sistem pendidikan yang memisahkan ABK dari komunitas 'normal', mereka dilayani berdasarkan jenis kelainannya dalam satu atau beberapa unit sekolah khusus untuk satu atau beberapa jenis kelainan. Sistem integratif atau terpadu adalah sistem sekolah reguler yang memberikan kesempatan kepada ABK untuk mengikuti pendidikan bersama-sama dengan anak-anak sebaya yang lain bagi yang memungkinkan. Sistem ini mengutamakan terjadinya integrasi fisik dan sosial antara ABK dan non ABK. Sistem integratif mengharuskan siswa ABK menyesuaikan dengan tuntutan sekolah. Pendidikan

inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak tanpa kecuali (ABK dan non ABK) untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler sesuai dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus peserta didik. Sistem ini mengutamakan terjadinya integrasi fisik, sosial dan akademik bagi semua anak, dan mengharuskan sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

C. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian yang kemudian disempitkan menjadi pertanyaan penelitian, ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

Berdasarkan rumusan tersebut, maka disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana proses penetapan kebijakan operasional pendidikan inklusif di SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi mencakup yang aspek-asepk?
 - a. Bagaimanakah pemahaman warga sekolah tentang kebijakan pendidikan inklusif menuntut adanya efektifitas implementasi di sekolah?
 - b. Bagaimanakah komponen-komponen pembelajaran yaitu kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, pembiayaan, sarana prasarana dan penilaian di sekolah?
 - c. Bagaimanakah kebijakan teknik yang dilaksanakan di sekolah?
 - d. Bagaimanakah cara merancang kembali kebijakan tentang dimensi-dimensi mutu di sekolah dalam pencapaian visi dan misi untuk manajemen berbasis sekolah?
 - e. Bagaimanakah efektifitas implementasi dilaksanakan di sekolah?
 - f. Bagaimanakah kebijakan sebagai harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah?
- 2) Bagaimana sosialisasi pendidikan inklusif yang dapat diaplikasikan di SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi?

- a. Bagaimanakah mentransformasi sistem pendidikan untuk melaksanakan efektifitas implementasi dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan inklusif di sekolah?
 - b. Bagaimanakah cara mensosialisasikan pendidikan inklusif untuk meningkatkan layanan pada masyarakat di sekolah?
 - c. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam sosialisasi yang terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan di sekolah?
 - d. Bagaimanakah pendidikan inklusif untuk memberikan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang di didik bersama-sama anak pada umumnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki di sekolah?
 - e. Bagaimanakah langkah-langkah proses sosialisasi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan efektifitas implementasi di sekolah?
- 3) Bagaimana program pendidikan inklusif yang dijalankan di sekolah mempunyai anak berkebutuhan khusus dilaksanakan di SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi?
- a. Bagaimanakah program kurikulum yang dilaksanakan mengikuti kurikulum biasa di sekolah?
 - b. Bagaimanakah tenaga pendidik wajib harus memiliki kompetensi pembelajaran bagi peserta didik pada umumnya maupun berkebutuhan khusus?
 - c. Bagaimanakah sarana dan prasarana dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah?
 - d. Bagaimanakah peserta didik mendapat bimbingan sama rata oleh guru mata pelajaran di sekolah?
 - e. Bagaimanakah kegiatan monitoring dan evaluasi mengawal keterlaksanaan penyelenggaraan program pendidikan inklusif di sekolah?
- 4) Bagaimana implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 2 Cibabat Mandiri, SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi?

- a. Bagaimanakah keterlibatan semua pihak untuk membuktikan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah?
 - b. Bagaimanakah melaksanakan pendidikan inklusif dan ramah terhadap pembelajar di sekolah?
 - c. Bagaimanakah melakukan bimbingan khusus atas kesepahaman dengan orangtua ABK di sekolah
 - d. Bagaimanakah tugas pelaksanaan program sekolah inklusif dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas pada pendidikan inklusif?
- 5) Bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur dan menilai hasil serta kinerja pelaksanaan program penyelenggara sistem pendidikan inklusif pada SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi?
- a. Bagaimanakah penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah?
 - b. Bagaimanakah peserta didik mendapat layanan yang baik di sekolah?
 - c. Bagaimanakah penyelenggara pendidikan inklusif dukungan guru yang relevan di sekolah?
 - d. Bagaimanakah pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan inklusif yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah?
 - e. Bagaimanakah mekanismen pengelolaan pendanaan dilaksanakan di sekolah?
 - f. Bagaimanakah peningkatan mutu pendidikan inklusif perlu didukung kemampuan manajerial kepala sekolah ?
 - g. Bagaimanakah optimalisasi sumber daya masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah
- 6) Bagaimana dampak implementasi kelas inklusif terhadap peningkatan dan perluasan akses pendidikan pada SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi?

- a. Bagaimanakah upaya pemenuhan hak siswa mendapatkan pendidikan inklusif?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan inklusif?
- c. Bagaimanakah terwujudnya proses pembelajaran dengan lingkungan pembelajaran yang kondusif, komunikatif, aksesibel ramah dan bersahabat untuk semua?

D. Tujuan

Secara umum penelitian ini disusun dengan tujuan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada sosialisasi, program, pengorganisasian, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, dan dampak pendidikan inklusif dalam mencapai mutu pada SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi.

Secara khusus, penelitian ini ditunjukkan untuk:

1. Mendeskripsikan aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, monnev dan dampak pendidikan inklusif pada SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi
 - a. Pemahaman warga sekolah tentang kebijakan pendidikan inklusif menuntut adanya efektifitas implementasi di sekolah melakukan perubahan terutama dalam penyediaan akses dan sumber daya lingkungan, fisik, sosial, maupun akademik.
 - b. Komponen-komponen kebijakan SNP yaitu kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, pembiayaan, sarana prasarana dan penilaian di sekolah
 - c. Kebijakan teknik yang dilaksanakan di sekolah
 - d. Cara merancang kembali kebijakan tentang dimensi-dimensi mutu di sekolah dalam pencapaian visi dan misi untuk manajemen berbasis sekolah
 - e. Indikator-indikator efektifitas implementasi dilaksanakan di sekolah

- f. Langkah-langkah kebijakan sebagai harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah
2. Untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SDN 2 Cibabat Mandiri, SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi.
 - a. Sosialisasi pendidikan inklusif yang dapat diaplikasikan di sekolah
 - b. Program pendidikan inklusif yang dijalankan di sekolah
 - c. Pengorganisasian menerapkan kelas inklusif di sekolah
 - d. Pelaksanaan program sekolah inklusi dapat direalisasikan di sekolah
 - e. Monitoring dan evaluasi pada pendidikan inklusif di laksanakan di sekolah
 - f. Dampak implementasi sekolah inklusif terhadap peningkatan perluasan akses pendidikan di sekolah
3. Menyusun model peningkatan efektivitas implementasi di Sekolah Dasar

E. Manfaat Penelitian

Apabila hasil penelitian ini terbukti memiliki dampak positif dan efektif terhadap perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan bagi semua anak, maka penelitian strategi pengembangan sekolah inklusif ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun secara praktis. Manfaat yang dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritik

Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk memperkaya bukti empirik pelaksanaan suatu kebijakan dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan inklusif pada pendidikan dasar.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai dasar dan acuan, baik bagi kepala sekolah, guru, orangtua maupun pengelola (Dinas Pendidikan) dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan perubahan atau perbaikan pendidikan secara lebih luas, baik dalam peningkatan proses pembelajaran,

peningkatan mutu layanan serta perluasan akses bagi semua anak di seluruh wilayah Kota Cimahi.

- a. Sebagai masukan bagi pengambil keputusan di tingkat Kab/Kota untuk meningkatkan layanan inklusif di setiap jenjang
- b. Masukan bagi sekolah dilokasi penelitian untuk meningkatkan layanan bagi peserta didik dalam program inklusif

F. Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini ditulis dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi disertasi.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran yang terdiri dari kajian teori, kerangka pemikiran penelitian

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, fokus kajian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan berisi pemaparan tentang hasil penelitian terkait; A. Temuan Penelitian, yang terdiri dari (1). Sosialisasi pada SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi; (2). Program pada SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi, (3). Pengorganisasian pada SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah Kota Cimahi, (4). Pelaksanaan pendidikan inklusif pada SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah Kota Cimahi, (5). Monitoring dan evaluasi pada SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah di Kota Cimahi, (6). Dampak kebijakan pendidikan inklusif pada SDN 2 Cibabat Mandiri , SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah Kota Cimahi; B. Pembahasan Hasil Penelitian, dan C. Pengembangan model hipotetik efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inkludif di SDN..

Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan implikasi dan rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.